

Judul : Pemerintah kebut aturan turunan UU TPKS
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

REGULASI

Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU TPKS

TERKAIT dengan penyusunan aturan turunan UU TPKS, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan pemerintah akan bergerak cepat agar UU TPKS aplikatif.

Hal itu disampaikan dalam menanggapi dorongan Ketua DPR Puan Maharani agar pemerintah segera menyusun aturan turunan dari UU TPKS.

Puan berharap agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

"Ini penting agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual," ujarnya, ke-

marin.

Menurut Puan, sekaranglah saatnya UU TPKS diterjemahkan menjadi aturan pelaksanaan teknis agar wujud nyata semangat penyusunannya dapat segera dirasakan.

Seusai pengesahan UU TPKS apresiasi datang dari berbagai pihak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkomitmen

kuat mengawal perjalanan UU tersebut.

Menurutnya, itu ialah sebuah kemenangan bagi segenap elemen bangsa. "Kini, ada perlindungan nyata yang lebih kuat terutama bagi perempuan dan anak dalam menghadapi segala macam ancaman kekerasan seksual," ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS).

Perwakilan dari FPL, Mike Verawati, mengatakan pekerjaan rumah FPL dan JMS selanjutnya ialah melakukan advokasi peraturan turunan dari UU PKS. (Sru/Pra/Ata/Iam/X-7)